IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Kristayani

Kristayani.situmorang2476@student.unri.ac.id

Pembimbing : Zulkarnaini

zulkarnainfisip@lecture.unri.ac.id

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Since January 2020, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has infected more than 2,245,872 people including in Indonesia. Covid-19 is very dangerous to society due to the rapid increase in people affected by Covid-19 in Indonesia, including in Pekanbaru City. The city of Pekanbaru is one of the cities with the most dense population, making it easy for this virus to spread. The high spread of Covid-19 in society has prompted the Indonesian government to issue Minister of Health Regulation Number 18 of 2021 concerning the Implementation of Vaccinations in the Context of Mitigating the Corona Virus Disease (Covid-19). This vaccination policy aims to reduce transmission, reduce morbidity and mortality, achieve group immunity in the community, protect the community from Covid-19 so that they remain socially and economically productive. In this study using qualitative methods with data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The data were analyzed qualitatively using the theory of Yulianto Kadji policy implementation model, namely MSN- Approach (Mentaliti, System, Networking) using the system-approach indicator. The results of this study based on system-approach indicate that the implementation of the vaccination policy has been going quite well but in its implementation there are still obstacles and rejections, namely there are still elderly people who have not been vaccinated, limited vaccine stock, long queues for vaccine implementation.

Keyword : *Implementation, Covid-19, Vaccination, System-Approach*

Abstract

Sejak Januari 2020, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa termasuk juga di Indonesia. Covid-19 sangat membahayakan masyarakat dikarenakan pesatnya kenaikan masyarakat yang terkena Covid-19 di Indonesia termasuk di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat sehingga mudahnya virus ini menyebar, Kota Pekanbaru pernah masuk dalam kasus tertinggi Covid-19, banyak masyarakat yang terpapar Covid-19. Tingginya penyebaran Covid-19 di masyarakat membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Kebijakan vaksinasi ini bertujuan, mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data di analisis secara kualitatif menggunakan teori model implementasi kebijakan Yulianto Kadji yaitu *MSN-Approach* dengan menggunakan indikator *System-Approach*. Hasil penelitian ini berdasarkan *system-approach* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi telah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan dan penolakan yakni, masih terdapat lansia yang belum di vaksin, stok vaksin terbatas, terjadinya antrian panjang pada pelaksanaan vaksin.

Kata kunci : implementasi, Covid-19, Vaksinasi, System-Approach

PENDAHULUAN

Sejak Januari 2020, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa di seluruh dunia (WHO, 2020). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional dan menjadi sorotan berbagai media. Penambahan jumlah kasus Covid-

19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara satu dengan yang lainnya. Indonesia adalah salah satu negara yang terkonfirmasi Covid-19 dan menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi terjadinya peningkatan kasus positif Covid-19, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-

19. Persebaran Covid-19 di Indonesia telah merata keseluruh provinsi di Indonesia, ada ribuan bahkan sampai jutaan orang yang terpapar positif Covid-19 di Indonesia setiap harinya.

Negara-negara di seluruh dunia terus berusaha untuk menemukan vaksin yang tepat untuk menanggulangi dan menghentikan Covid-19 yang terus menyebar. Para ilmuwan dari berbagai negara berusaha untuk menemukan vaksin yang diharapkan dapat mengatasi Virus Corona yang semakin menyebar.

Implementasi kebijakan vaksin di Indonesia sendiri pertama kali dilakukan pada Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, dan seluruh pejabat negara. Pada tahap awal, vaksinasi Covid-19 dilakukan kepada seluruh tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang menjalankan pendidikan profesi dokter, dan seluruh petugas pelayanan publik yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait Covid-19.

Selanjutnya, vaksinasi dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, yang dianggap sebagai bentuk

perlindungan

nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, istilah *Hard Immunity* atau kekebalan kelompok di masyarakat digunakan pada suatu keadaan dimana 80 persen kelompok masyarakat memiliki kekebalan tubuh pada penyakit sehingga melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi akan jauh lebih hemat, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukannya vaksinasi lanjutan (booster) bagi masyarakat untuk memastikan bahwa imunitas masyarakat tetap terjaga tinggi. Diatur dalam Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*). SE ini ditujukan kepada para kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta kepala/direktur rumah sakit (RS) dan kepala/pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di seluruh Indonesia. Vaksinasi *booster* adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap vaksinasi *Covid-19* sangat beragam, yang dilihat berdasarkan keberhasilan tujuan vaksinasi, keamanan vaksin, kegunaan vaksin, serta pandangan menurut agama mengenai vaksinasi. Persepsi tersebut lah yang mempengaruhi kesediaan penduduk terhadap penerimaan vaksinasi *Covid-19*. Munculnya persepsi negatif dari penduduk mengakibatkan penentangan pada jalannya vaksinasi. Dinas Kesehatan (DINKES) Pekanbaru akui minat masyarakat Pekanbaru untuk vaksin booster masih rendah. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru Zaini Rizaldy menyampaikan masyarakat masih enggan mengakses langsung layanan vaksin booster kedua dan mendapat suntikan vaksin booster masih rendah. Zaini menyampaikan bahwa capaian vaksin dosis booster pertama saja hampir 39 persen. Sedangkan untuk vaksin booster kedua baru 2,17 persen.

kepatuhan masyarakat terhadap anjuran pemerintah dipengaruhi oleh kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah dengan penanganan pandemi yang terorganisir, adil, dapat menyampaikan informasi dengan jelas, dan berpijak pada pengetahuan cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Keempat faktor ini mempengaruhi kemauan masyarakat dalam melaksanakan anjuran perilaku kesehatan yang prososial.

Terkait dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui tentang "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Studi Pada Vaksinasi Booster". Pada pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian

kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara mendeskripsikannya secara alami melalui kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu. Gunakan berbagai metode alamiah.

Peneliti juga menggunakan catatan lapangan berupa catatan observasi dan sumber lainnya. Penelitian dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu. Peneliti berusaha mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke tempat kejadian dan menemui informan, melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi Covid- 19 booster di kota Pekanbaru. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks deskripsi agar lebih mudah dipahami berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan.

RUMUSAN MASALAH

Untuk lebih fokus dalam melakukan penelitian di kota Pekanbaru, peneliti merumuskan masalah diantaranya :

1. Bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor - faktor penghambat implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 dikota Pekanbaru ?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan alasan di atas tujuan dari penelitian ini :

1. Menganalisis implementasi kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat implementasi kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Pekanbaru telah merumuskan serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Beberapa kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis.

Kebijakan Vaksinasi Booster dalam Tinjauan MSN *Approach* (Analisis System Approach) penyelenggaraan Vaksinasi Booster dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kota Pekanbaru, berjalannya berdasarkan Surat Edaran No HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi Dosis Lanjutan (booster) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Selanjutnya hasil studi menunjukkan terjadinya penurunan antibodi 6 bulan setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis primer lengkap sehingga dibutukannya pemberian dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan.

1. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Pekanbaru (Studi pada Vaksinasi Booster)

Implementasi merupakan bagian dari satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan menurut Yulianto Kadji adalah implementasi kebijakan bersinggungan langsung dengan tiga dimensi policy of stakeholder atau pihak yang berkepentingan dengan kebijakan yaitu : *Government, Private Sector, dan Civil Society* (Kadji, 2015:86).

Berdasarkan Teori dari Yulianto Kadji yaitu Model Implementasi Kebijakan Publik melalui pendekatan *Mentality, System, and Networking* atau disebut Model Implementasi Kebijakan melalui MSN- *Approach* kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi policy of stakeholders, yaitu : *Government, Private*

Sector, dan Civil Society. Kebijakan MSN-*approach* (Pendekatan Sistem). Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi booster pasca Covid-19 di Kota Pekanbaru berdasarkan pendekatan sistem yang ada 3 indikator yaitu :

1. Sitem Regulasi

Dalam sistem regulasi Yulianto Kadji (2015) mendeskripsikan dalam bentuk sub sitem kepentingan publik, partisipatif dan produktif. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dan sebagai implemendor (aparatnya) meyakinkan bahwa regulasi yang dibentuk benar – benar untuk kepentingan publik secara transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Dan dilanjutkan dengan Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (booster). Salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada publik agar terhindar dari virus Covid-19. Dalam peraturan tersebut dalam kita lihat bagaimana pemerintah berupaya untuk kepentingan publik dari wabah covid-19, dalam hal ini bentuk kepedulian yang dilakukan pemerintah yaitu mengadakan vaksinasi agar terbentuknya kekebalan tubuh dari usia anak – anak, remaja, sdm kesehatan, masyarakat rentan dan umum, lansia, ibu hamil, petugas publik dan disabilitas.

Dalam implemendor kebijakan vaksinasi booster, tentunya peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan, kebijakan ini dibuat benar – benar untuk kepentingan publik dan untuk meningkatkan produktivitas vaksinasi di Kota pekanbaru, pemerintah melakukan berbagai cara dengan mengadakan vaksinasi booster di

berbagai tempat yang gampang diakses masyarakat dan meningkatkan layanan informasi publik yang dapat bertanggungjawab.

2. Sistem Nilai Budaya

Yulianto kadji (2015:91) nilai budaya dalam implementasi kebijakan salah satunya mengenai kegotong royongan. Hal ini dimana kegotong royongan merupakan model utama sebagai penggerak dan penentu sebuah keberhasilan serta keberlanjutan pembangunan. setiap bangsa dan negara memiliki kebudayaan yang khas sehingga dapat membedakan dari bangsa lainnya. Bangsa Indonesia dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Salah satu nilai budaya yang masih melekat di masyarakat Indonesia sampai saat ini yaitu budaya gotong royong. Yaitu aktivitas bekerjasama anatar warga untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu yang yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. Adapun pengertian gotong royong yaitu gotong royong berasal dari kata 'gotong' yang berarti bekerja, dan 'royong' yang berarti bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gotong royong mempunyai arti bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu) di antara anggota-anggota suatu komunitas. Menurut ahli bernama Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo gotong royong merupakan adat istiadat tolong-menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga kekerabatan yang berdasarkan efisien yang sifatnya praktis dan ada pula aktivitas kerja sama yang lain. Menurut Kusnaedi, definisi otong royong ialah semua sikap positif yang akan mendukung perkembangan suatu desa dan juga dibutuhkan pertahanan sebagai wujud kebiasaan masyarakat untuk melakukan suatu pekerjaan dengan cara bersama-sama.

3. Sistem Struktur Dan Fungsi Organisasi

Yulianto Kadji (2015:91) mendeskripsikan struktur dan fungsi organisasi dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan program kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang didukung oleh adanya saling keterhubungan antara pemerintah, masyarakat sipil dan enterpreneur (interaksi), serta saling adanya ketergantungan (interdependensi), berikut adanya keterpaduan antara pemerintah, masyarakat sipil dan enterpreneur dalam kerangka mencapai tujuan bernegara dan bermasyarakat.

KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru Studi Pada Vaksinasi Booster pada pendekatan sistem masih belum tercapai dengan baik. Dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi booster pemerintah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru belum berhasil untuk mengajak masyarakat kota pekanbaru dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi Covid-19 booster agar mencapai target yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan dan mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang perlindungan terhadap virus di Kota Pekanbaru Yang optimal. Hal ini dapat kita ketahui dari pendekatan kebijakan yaitu :

System approach, ada 3 hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, yaitu Sistem Regulasi, Nilai Budaya, Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi. Pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam menimplementasikan seluruh kebijakan program kemasyarakatan, pemerintah dan pembangunan yang didukung oleh adanya saling keterhubungan antara pemerintah, masyarakat dan enterpreneur (interaksi), serta saling adanya ketergantungan (interpedensi), dan bertanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan suatu pekerjaan (integritas)

Ketiga ini merupakan faktor penentu dalam tercapainya implementasi kebijakan. Dalam sistem regulasi, bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat agar terhindar dari wabah Covid-19 melakukan vaksinasi primer dan booster, namun masyarakat masih ada yang belum melakukan vaksin. Agar tercapainya tujuan, bentuk nilai budaya masyarakat ikut adil dalam melaksanakan vaksinasi hal ini yang dinamakan gotong royong dan dalam sistem struktur dan fungsi organisasi ketergantungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menjalankan kebijakan.

2. Faktor – Faktor Penghambat Dalam Pemberian Vaksinasi Booster yaitu masih banyaknya masyarakat yang bersikap tidak peduli dan tidak percaya terhadap vaksin booster akibat tidak adanya edukasi serta sosialisasi yang kembali oleh Pihak Dinas Kesehatan kepada masyarakat sehingga membuat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian masih adanya beberapa masyarakat yang lanjut usia yang tidak mau vaksin booster dengan alasan tidak pergi kemana – mana. Hambatan selanjutnya yaitu minimnya informasi mengenai lokasi vaksin booster dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki handphone ataupun sosial media untuk mencari tau dimana lokasi yang menyediakan vaksin booster dan kurangnya koordinasi antar petugas vaksinasi dan masyarakat.

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan mengenai implementasi kebijakan vaksinasi booster, penulis mencoba memberikan beberapa saran semoga yang diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan kembali bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Adapun sarannya yang dapat penulis berikan :

1. Implementasi kebijakan vaksinasi booster pasca Covid-19 di Kota Pekanbaru agar berjalan dengan baik, ada baiknya Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi

kembali mulai dari kalangan menengah kebawah hingga ke lansia. Perlunya mengubah pendekatan insentif memaksa menjadi pendekatan edukatif serta edukasi vaksin yang smooth bahwa vaksinasi sangat penting bagi peningkatan imunitas agar daya tahan tubuh lebih kuat dalam menghadapi virus Covid-19, dengan itu masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat serta kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi meningkat dengan adanya kepercayaan publik dalam penanganan pandemi itu sangat penting kepercayaan dan kepatuhan pada kebijakan kesehatan publik

akan menghasilkan pengendalian pandemi yang efektif, sementara kepercayaan yang rendah akan menyebabkan

rendahnya

kepatuhan.

2. Terkait dengan Faktor Penghambat yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Booster di Kota Pekanbaru dalam tinjauan *MSN-approach* dalam sistem *approach* peneliti berharap agar pemerintah dan pihak swasta bekerjasama untuk membangun kepercayaan publik. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Rumah Sakit Aulia sebagai implementor untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi, dengan dibentuknya tim sosialisasi dan anti hoaxes dengan bekerjasama jurnalistik untuk pemberitaan yang lebih humanis tentang vaksinasi dalam rangka memperbanyak liputan dengan *tone positif*, termasuk meningkatkan *coverenge* liputan kegiatan pelaksanaan vaksinasi yang diinisiasi oleh pemerintah dan pihak swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Winarno, DRS., MA., PhD. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Deddy Mulyadi, Drs., M.Si. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Kadji, 2015. *Formulasi dan implementasikebijakan publik*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Miles, M.B., & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PenerbitUniversitas Indonesia
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riant Nugroho. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Solicchin Abdul Wahad, M.A. 2012. *Analisis Kebijakan*. Malang: Bumi Aksara.
- Sugiono (2017). *Metode penelitian kebijakan*. S.Y. Ratri, Ed Bandung. CV. Alfabett Dachi, Rahmat Alyakin. 2017. *Proses Dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual)*. Deepublish
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kebijakan*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung.
- Sujianto, M.Si., Ph.D. 2008. *Implementasi kebijakan publik*. Pekanbaru: Alaf Riau

Jurnal

- Aprilia, C. P., Sulistyaningsih, T., & Salahudin, S. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Sangatta Utara Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(1), 353-366.
- Jamil, M. (2022). Penerapan Surat Edaran Kemendagri No 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat di RW IV Kel. Salamanmloyo Kota Semarang. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 515-520.
- Kusyati, E., Hapsari, S., Widiati, A., & Prihatin, T. W. (2022, November). Vaksinasi Booster sebagai Upaya Mempertahankan Tingkat Kekebalan dan Memperpanjang Masa

- Perlindungan. In *Prosiding Seminar Nasional Unimus* (Vol. 5).
- Nugroho, D., Haris, S., & Irfan, A. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1), 89-103.
- Oktary, M., & As'ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Dalam Tinjauan Msn Approach (Analisis System Approach Pada Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021). *Cross-border*, 5(2), 1338-1348.
- Onthoni, C. R. (2022). *1 Implementasi Kebijakan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Rahmadi, F. E., & Amri, K. (2023). Efektivitas Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan dalam Pemberian Vaksin Booster di Kota Pekanbaru. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(2), 30-40.
- Samosir, D. C. Y., Yenny, Y., & Pangaribuan, S. M. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Vaksinasi Booster Covid-19 di Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara. *Jurnal Kesehatan*, 14(1), 72-80.
- Sinaga, E. S., Pou, R., Tarigan, G. H., Yuwono, B. E., & Hartini, H. (2022). Pemberian Vaksinasi Booster Covid-19 Sebagai Upaya Percepatan Terbentuknya Kekebalan Kelompok Pada Masyarakat di Wilayah DKI Jakarta. *JUARA: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera*, 228-237.
- Utami, F., Kurnianingsih, F., & Edison, E. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Batam Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji)